

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi Ilmu Hubungan Internasional dewasa ini telah berkembang dengan pesat. Dinamika dalam Hubungan Internasional saat ini tidak hanya berfokus pada isu-isu tradisional saja, namun ada banyak isu yang patut untuk dibahas. Tidak hanya mengenai tentang konflik, perjanjian internasional, diplomasi, tetapi hal-hal seperti bagaimana sebuah Negara yang dikucilkan dapat mencapai keberhasilannya juga sangat mungkin untuk dikaji. Seperti fenomena keberhasilan Taiwan yang mendapatkan pengakuan dunia melalui pertumbuhan perekonomiannya yang mandiri. Munculnya fenomena Taiwan sebagai salah satu Macan Asia sangat menarik untuk dikaji. Mulai dari sejarah berdirinya Taiwan, pengakuan dunia terhadap Taiwan, kondisi sosial, ekonomi, dan politik serta faktor-faktor apa saja yang menjadikan Taiwan negara yang dipandang sebelah mata dalam hal legitimasi politik justru memiliki kekuatan ekonomi yang begitu berpotensi dan terbukti kredibilitasnya.

Taiwan adalah sebuah negara di sebuah pulau kawasan Asia Timur yang memiliki struktur perekonomian yang terdiri dari industri kecil dan menengah yang berkembang pesat dan menghasilkan output berkualitas unggulan yang dapat bersaing di pasar global. Dengan menerapkan sistem ekonomi-politik korporatif dan seiring berkembangnya kini Taiwan menjadi negara yang maju. Kegiatan perihwal perekonomian seperti Ekspor – Impor merupakan alat yang menopang berdirinya industri Taiwan sehingga hal ini menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi Taiwan.

Ketergantungan yang besar pada ekspor ini membuat perekonomian berfluktuasi dalam permintaan global. Isolasi diplomatik Taiwan, tingkat kelahiran rendah, populasi yang cepat menua, dan meningkatnya persaingan dari China dan pasar Asia Pasifik merupakan bentuk tantangan jangka panjang bagi negara Taiwan. (Perwira, 2012).

Taiwan kerap dijuluki sebagai satu dari empat macan Asia yang lain yaitu Hongkong, Singapura, Taiwan dan Korea Selatan. Istilah macan Asia diberikan kepada Taiwan karena dianggap dapat menjaga laju pertumbuhan ekonomi yang terhitung cukup tinggi dan akselerasi industrialisasi pada awal 1960-an hingga 1990-an tepatnya saat krisis Asia berlangsung. Karakteristik umum dari Macan Asia Timur sendiri adalah: menjadikan kegiatan ekspor ke negara industri kaya sebagai pusat perekonomian, mendapat surplus perdagangan dengan negara-negara kaya, biaya tinggi untuk impor, kemudian dalam beberapa dekade dapat mempertahankan pertumbuhan dua digit, memiliki politik dengan sistem yang relatif tidak demokratis dan condong otoriter pada masa awal, pemegangan saham harta Amerika Serikat yang tinggi, dan yang terakhir memiliki suku bunga simpanan yang cukup tinggi (bbc.com, 2017).

Dalam sejarahnya Taiwan dan China dulu berada di bawah satu pemerintahan sebelum pada akhirnya Perang Sipil (1945 – 1949) yang diproklamkan kemenangan oleh Partai Komunis China dan mengirim sisa-sisa rezim membuat Taiwan memisahkan diri. Adapun setelah China dan Taiwan memisahkan diri, isu *territorial claiming* menjadi isu yang membawa wilayah *cross-strait* antara China dan Taiwan menjadi wilayah dan isu yang dapat memicu konflik. Perbedaan interpretasi tentang pengertian kepemilikan *mainland* China menjadi salah satu faktor penghambat hubungan China dan Taiwan untuk membaik. Isu yang seringkali

disebut dengan *One China* ini terus bergulir hingga awal abad 20.

Hubungan Taiwan dan china semakin rumit setelah ditetapkannya revolusi *One China Policy*, *One China Policy* adalah pengakuan diplomatik terhadap posisi China bahwa hanya ada satu pemerintah China. Berdasarkan kebijakan tersebut, AS mengakui dan memiliki hubungan formal dengan China dan bukan pulau Taiwan, yang oleh China dianggap sebagai provinsi yang memisahkan diri untuk disatukan kembali dengan daratan suatu hari nanti. Meskipun pemerintah Taiwan mengklaim bahwa ini adalah negara merdeka yang secara resmi disebut "Republik China", setiap negara yang menginginkan hubungan diplomatik dengan China daratan harus memutuskan hubungan resmi dengan Taipei. Hal ini mengakibatkan isolasi diplomatik Taiwan dari masyarakat internasional. (bbc.com, 2017)

Walaupun Perang Dingin antara China daratan dan Taiwan kini telah usai, namun status kedaulatan politik pemerintahan Taiwan masih menjadi suatu isu yang belum dapat terselesaikan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Pemerintah Republik Tiongkok yang dulunya sebagai salah satu dari pencetus serta sebagai pendiri utama Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan sempat menduduki kursi anggota tetap Dewan Keamanan, sayangnya terhitung sejak tahun 1971 dikeluarkan kedudukannya yang tercantum dalam Resolusi PPB A/RES/2758 dan semua jabatan serta kedudukan dalam organisasi diganti semua itu oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT). (indonesian.cri.cn, 2009)

Taiwan telah mencoba sekian kali usaha untuk dapat merebut kembali posisi nya dan masuk ke badan perserikatan dunia tersebut namun ternyata masih belum berhasil. Walau demikian meskipun begitu kini Taiwan hanya ingin menjadi anggota PBB saja tentunya sebagai

negara mandiri yang tidak meliputi Republik Rakyat Tiongkok itu sendiri. Pemerintah Taiwan mendapat dampak dari citra buruk yang diakibatkan oleh Kebijakan *One China Policy* yang digagas oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok di China daratan. Oleh karena itu banyak negara dunia yang kemudian merubah kebijakan diplomatik ke pemerintah yang berada di China daratan sejak tahun 1970-an hingga kini, Taiwan hanyalah diakui keberadaannya oleh sekitar 23 negara berkembang.

Di beberapa negara belahan dunia yang tidak mengakui Taiwan secara resmi, sebagai alternatif lain dalam menjalankan kerjasama yakni dengan mendirikan perwakilan menggunakan sebutan Kantor Perwakilan Perdagangan dan Kebudayaan Taipei atau disingkat sebagai "Kantor Perwakilan Taipei". Fungsi kantor perwakilan ini sesungguhnya sama seperti kantor kedutaan yang lain yaitu diantaranya memberikan layanan untuk membuat visa dan lain-lain perihal kewarganegaraan. Implikasi adanya kebijakan *One China Policy* bagi hubungan diplomatik Indonesia dan Taiwan hanya sebatas menjalin kerjasama di bidang ekonomi melalui kantor dagang Indonesia yang terletak di Taiwan sejak tahun 1994. Dengan berdirinya Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei inimenjadi satu-satunya lembaga ekonomi bersifat non-Pemerintah, dengan fungsi pokok melancarkan dan meningkatkan upaya kerjasama ekonomi dan perdagangan antara pihak Indonesia dan Taiwan. (Maulana, 2016)

Meskipun dalam segi kedaulatan politik Taiwan masih dalam sebuah dilema namun Taiwan memiliki kekuatan kokoh yang dapat diakui kredibilitasnya dalam bidang ekonomi. Industri Taiwan terfokus menjadi salah satu pemasok ekspor terbesar komponen *handphone*, suku cadang mobil, dan elektronik pasar global. Sistem klastering Taiwan sudah sangat maju dan aktif kompetitif di Negara nya sejak dimulainya 50 tahun yang lalu.

Industri klaster ini kemudian mengalami perkembangan pesat bahkan mendapat *feedback* dari pemerintah dengan memfasilitasi secara regulasi, dengan tujuan supaya klaster dapat terus bereksplorasi.

Terdapat 12 klaster industri di Taiwan yang diplotkan di 12 kota besar. Setiap klaster terdiri dari ribuan perusahaan, dari ukuran perusahaan besar, menengah maupun perusahaan kecil yang memproduksi barang dan jasa. Seperti Taiwan kota industri suku cadang, tekstil, *shipbuilding*, dan optoelektronik; kemudian di Taipei yang berfokus untuk industri ICT, elektronik, dan *software*; Changhua kota industri *handstool*, *glass*, *bicycles*, dan *hardware* ; kota *Kaohsiung* industri *steel*, mur, sekrup dan makanan beku (*frozen food*); serta yang terakhir Taichung kota industri mesin-mesin manufaktur (*machinary*), *handstool*, dan *autotronics*. (DetikFinance, 2012)

Selain itu pemerintah Taiwan memiliki kebijakan ekonomi domestik yang cukup unik yakni dengan memberi keuntungan melalui insentif menarik kepada industri. Kebijakan tersebut diantaranya, lahan serta tanah pemerintah yang dijual murah jika diperuntukkan untuk membangun industri. Hal tersebut menunjukkan pemerintah berpihak pada pembangunan infrastruktur dengan adanya penggunaan high teknologi pada setiap fasilitas. Contoh lain dari keberpihakan pemerintah yakni penggunaan teknologi tinggi pada tiap klaster dengan dibangunnya keberadaan sekitar 17 Taman Teknologi (*Techno Park*). Dimana pada tiap-tiap taman berdiri beberapa institut riset dengan fokus yang beragam, dan selalu memberi pendampingan dan konsultasi pada industri baru berkembang. Di institusi ini pemerintah memberi kemudahan mengakses informasi dari pemerintah dan bagaimana tahapan penggunaan *high technology*.

Pemerintah Taiwan kini berencana untuk mengubah struktur ekonomi dan laju pertumbuhan industri Taiwan, pemerintah lebih fokus pada pengembangan industri '5 plus 2'. Program ini adalah industri di bidang teknologi energi hijau, *biomedis*, mesin cerdas, pengembangan *Asia Silicon Valley*, *biomedis*, pertahanan dan kedirgantaraan nasional, serta meliputi perkembangan paradigma pertanian baru dan lingkaran ekonomi. Di lain hal, pemerintah Taiwan juga secara mempromosikan Kebijakan Baru Southbound yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesatuan ekonomi antara Taiwan dengan ASEAN, Asia Selatan, serta Australia hingga Selandia Baru. Nantinya tiap Kantor Perwakilan Dagang Taiwan telah menerbitkan pedoman, dan kerangka kerja untuk menjalankan kebijakan tersebut yang memiliki empat bidang *goals* utama antara lain ekonomi dan kerja sama perdagangan, konektivitas regional, pertukaran bakat, dan berbagi sumber daya. (Michaella, 2017)

Begitulah kiranya bagaimana Taiwan tetap mendapat julukan Macan Asia meskipun Taiwan masih belum banyak mendapatkan pengakuan secara *de jure* dari dunia Internasional. Namun Taiwan mampu menjalankan surplus perdagangan dengan banyak negara praktisi ekonomi, termasuk China dan Amerika Serikat, dan cadangan devidennya adalah yang terbesar kelima di dunia, di belakang China, Jepang, Arab Saudi, dan Swiss. Pada tahun 2006, China melampaui AS untuk menjadi sumber impor terbesar kedua di Taiwan setelah Jepang. China juga merupakan pulau nomor satu untuk investasi asing. Taiwan sejak tahun 2009 telah secara bertahap melonggarkan peraturan yang mengatur investasi China dan juga mengamankan akses pasar yang lebih besar bagi para investornya di China daratan. Pada bulan Agustus 2012, Bank Sentral Taiwan menandatangani nota

kesepahaman (MOU) mengenai penyelesaian mata uang lintas-Strait dengan mitranya dari China. (cia.gov, 2017)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menetapkan suatu permasalahan sebagai berikut : “Faktor – faktor apa yang menjadikan Taiwan sebagai Macan Asia meskipun hanya sedikit negara yang mengakui kedaulatannya?”

C. Kerangka Berpikir

Untuk memahami suatu fenomena serta menjawab pokok permasalahan yang ada diperlukan kerangka dasar pemikiran berupa teori ataupun konsep untuk menganalisa permasalahan tersebut. Menurut Mochtar Mas’oed teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. (Mas’oed, 1990, p. 185) Sementara suatu konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu. (Mas’oed, 1990, p. 90) Berdasarkan uraian tersebut kerangka dasar pemikiran yang akan digunakan dalam permasalahan ini adalah :

1. Teori model Pengambilan Kebijakan Luar Negeri (Foreign Policy Decision Making)

Menurut Jack Plano dan Roy Olton, *Foreign Policy* adalah sebuah strategi atau tindakan terencana yang dikembangkan oleh *decision maker* dari sebuah negara terhadap negara lain atau unit dan lembaga internasional yang digunakan untuk meraih tujuan-tujuan tertentu berdasarkan kepentingan nasional. (Jack C. Plano and Roy Olton, 1980) Teori politik luar negeri adalah teori yang menjelaskan pola tingkah laku yang ditunjukkan oleh suatu negara sewaktu berjuang mendapatkan kepentingannya. (Mas’oed, 1990, p. 43)

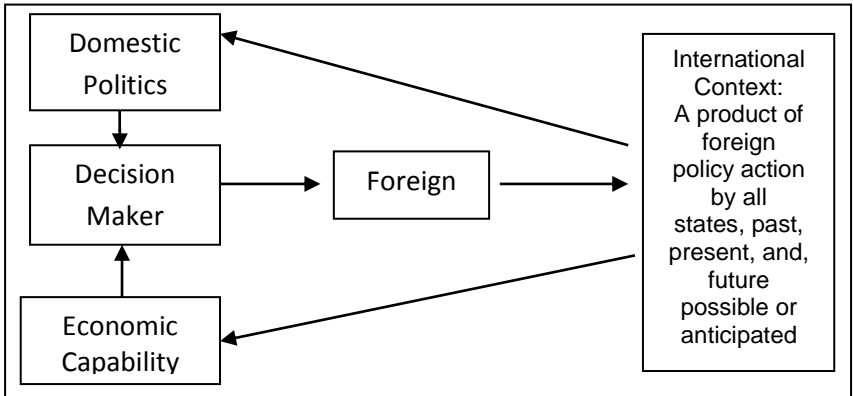
Dalam kasus Taiwan diatas tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses perumusan pengambilan kebijakan luar negeri negara tersebut. Disini penulis akan menggunakan teori model pengambilan kebijakan menurut William D Coplin menggunakan analisis pendekatan rasionalitas.

Pendekatan rasionalitas menekankan bahwa Negara merupakan actor untuk mencapai tujuan nasional. Untuk menggapai tujuan nasional itu mereka lakukan dengan menimbang secara rasional aspek dalam kancan politik Internasional. Pada pendekatan ini, respon terhadap sesuatu yang dilakukan oleh negara lain dianggap sebagai politik luar negeri yang dikeluarkan oleh kebijakan suatu negara. (William D. Coplin and M. Marbun, 2003)

Menurut Coplin, untuk dapat memahami mengapa suatu negara berperilaku sejalan dengan wilayah kepentingan mereka, kita harus memahami juga mengapa atau apa yang melatar belakangi para pemimpin mereka membuat keputusan. Setiap kebijakan luar negeri yang diberikan dapat dilihat sebagai hasil dari tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negri negara-negara pengambil keputusan. Yang pertama adalah politik dalam negeri dalam kebijakan negara-negara pengambil keputusan. Yang kedua adalah kemampuan ekonomi dan militer negara. Yang ketiga adalah konteks internasional, posisi tertentu di mana negara itu menemukan jati dirinya, khususnya mengenai hubungannya dengan negara lain dalam suatu sistem (William D. Coplin and M. Marbun, 2003, p. 30).

Pemaparan mengenai teori diatas dapat dijelaskan secara rinci dalam diagram teori pembuatan kebijakan politik luar negeri,sebagai berikut:

Gambar 1.1 Model Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri Menurut William D. Coplin



Aplikasi teori ketiga kategori determinan tersebut yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dalam kasus Taiwan yaitu :

1. Situasi politik domestik

“Bahwa politik dalam negeri adalah seperangkat determinan yang bekerja dalam politik luar negeri sebuah negara”. Meskipun keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami oleh sistem itu bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu, faktor lain juga dapat bekerja didalamnya. Kita bisa mencontohkan sikap pengambil keputusan atau struktur konsep internasional. Teori William D Coplin diatas didukung oleh argumentasi David Easton tentang sistem politik. Menurutnya, “Kondisi Politik Dalam Negeri merupakan gambaran

mengenai “dukungan dan tuntutan” yang datang dari warga negara” atau dalam bahasan Easton disebut sebagai input. Input itu yang kemudian akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politis, baik dalam lembaga legeslatif maupun eksekutif dan selanjutnya akan membentuk kondisi dalam negeri. Sehingga para pembuat keputusan dapat mengacu pada kondisi dalam negeri, apakah dukungan dan tuntutan dari masyarakat sejalan dengan kebijakan yang dirumuskan dilembaga politik. (Budiardjo, 2008, p. 77)

Kaitan dengan konteks Taiwan seperti yang diketahui bahwa hingga saat ini Taiwan belum mendapatkan pengakuan banyak dari para negara maju di dunia atas kemerdekaannya, meskipun hampir dari seluruh negara tersebut melakukan banyak sekali kerjasama di berbagai bidang dengan Taiwan. Mengingat politik domestik Taiwan yang menganut sistem demokrasi – kapitalis sehingga berbeda pandangan dengan China daratan. Disana kemudian munculah tuntutan dari dalam negeri baik pemerintah maupun masyarakatnya untuk sesegera mungkin dapat diakui identitasnya bahwa Taiwan inilah negara yang berdaulat tidak berada lagi dibawah campur tangan dinasti China. Masyarakat pun dengan baik sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga mempermudah jalan bagi Taiwan untuk melakukan kerjasama ekonomi dengan Negara demokratis lainnya.

2. Situasi ekonomi dan militer domestik.

Maksudnya adalah “suatu negara harus memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya”. Didalamnya termasuk juga aspek geografis yang selalu melatar

belakangi pertimbangan keamanan dan pertahanan. Dalam aspek ini Taiwan sudah tidak perlu dilakukan lagi kekuatan ekonominya yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Dengan kemampuan inilah Taiwan menjadi percaya diri dan menjadikan perangkat ekonomi yang dibangunnya menjadi alat yang besar untuk menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat dunia. Dan tujuan ini sudah berhasil dicapai oleh Taiwan dengan mendapatkan penobatan menjadi satu dari Macan Asia dengan salah satu ekonomi terbesar di Asia sehingga dapat mempermudah Taiwan dalam menjalankan misi lain yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya.

3. Konteks internasional

Terdapat tiga unsur utama dalam membahas dampak konteks internasional terhadap adanya suatu politik luar negeri sebuah negara, yaitu: geografis, ekonomis, dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terbagi atas lokasi yang didudukinya, dalam hubungannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu; dan juga hubungan-hubungan politik serta ekonomidiantara negara itu dengan negara dari wilayah lain. (William D. Coplin and M. Marbun, 2003, p. 166)

Lingkungan internasional setiap negara merupakan wilayah yang ditempatinya berkenaan dengan lokasi dan kaitannya dengan negara-negara lain dalam sebuah sistem politik internasional. Keterkaitan Taiwan tersebut termasuk dalam bidang ekonomi dan politik. Namun geografi lebih memainkan peranan yang penting, walaupun tidak yang terpenting namun Jika diperhatikan Taiwan berada pada letak geografis yang strategis sebagai jalur perdagangan dunia sehingga menjadi satu keuntungan bagi Taiwan. Faktor geografis dan geopolitik merupakan yang utama dalam terciptanya

organisasi lintas negaradan terciptanya kerjasama regional. Sehingga tercipta hubungan-hubungan politik dan ekonomi antar sesama negara anggota. Negara sebagai pengambil kebijakan luar negeri harus melihat itu dalam membuat keputusan.

2. Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Dalam kasus keberhasilan perekonomian Taiwan terdapat hal yang menarik dimana Taiwan mampu mencapai kepentingan nasional melalui suksesnya pembangunan ekonomi, sehingga mendapatkan pengakuan kredibilitas dari kancah Internasional meskipun dalam hal legitimasi politik Taiwan masih mendapatkan beberapa persoalan. Sebab kebijakan luar negeri sangat sejalan dengan keadaan kepentingan nasional setiap negara . Di dalam konsep kepentingan nasional dijelaskan bahwasanya demi menjamin keberlangsungan hidup suatu negara maka negara tersebut harus memenuhi kebutuhan negaranya sendiri demi tercapainya kepentingan nasional. Dengan mengutamakan pencapaian kepentingan nasional, maka negara akan berjalan dengan stabil, baik itu dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan dan keamanan.

Kepentingan nasional muncul akibat adanya kebutuhan mendesak dari suatu negara. Kepentingan ini dapat terlihat langsung dari kondisi domestik internalnya, baik dari segi ekonomi, politik, dan militer, bahkan segi sosial-budaya. Dengan berdasarkan suatu power yang diupayakan untuk diraih menjadikan negara memberi dampak yang dituju langsung agar mendapatkan pengakuan kekuatan dari kancah Internasional. Sosok sebuah negara dalam memberi landasan berdasarkan dari kepentingan nasional tidak dapat terhindarkan akan

menjadi indikator masyarakat transnasional sebagai negara yang mengadakan hubungan diplomasi yang terencana dari kebijakan luar negerinya. Dengan begitu, kepentingan nasional suatu negara secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari negara tersebut. (William D. Coplin and M. Marbun, 2003, p. 163).

Suatu kepentingan nasional dapat menunjukkan adanya gagasan-gagasan yang menjadi identitas dari negara. Fenomena itu dapat terlihat dari seberapa jauh fokus negara dalam mencapai target guna keberlangsungan bangsa. Dari landasan yang tercipta dapat dirumuskan apa saja hal-hal yang menjadi sasaran dalam jangka kurun waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut juga beriringan dengan seberapa penting identitas tersebut. Kepentingan Nasional juga dapat mengevaluasi serta memberitakan politik luar negeri yang pada langkah selanjutnya akan digunakan sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai guna mengusulkan suatu kebijakan. (Mas'ood, 1990, p. 345)

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, “kepentingan nasional suatu negara adalah kepentingan untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*survival*), kemerdekaan dan kedaulatan negara, keamanan militer, politik dan ekonomi”.

Disamping itu Jack C. Plano dan Roy Olton mendefinisikan “kepentingan nasional sebagai tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pemandu pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri”. Walaupun kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara tentunya selalu berbeda dalam pelaksanaannya, namun pada hakikatnya ada 5 kategori umum yang

disebut Jack C. Plano sebagai berikut (Jack C. Plano and Roy Olton, 1980) :

1. *Self Preservation* yaitu hak untuk mempertahankan eksistensi diri, tujuannya untuk mempertahankan diri agar negara yang memiliki power besar tidak melakukan atau merebut hegemoni kekuasaan yang nantinya dapat menimbulkan perpecahan, untuk mempertahankan diri tersebut negara yang bersangkutan melakukan kerjasama bilateral ataupun dalam wadah organisasi internasional. Konsep pertahanan diri (*Self Preservation*) ini mengalami perkembangan, sebab pertahanan diri bukan hanya didasarkan pada landasan pertahanan terhadap geografis negara tetapi berkaitan dengan kekuasaan hegemoni suatu negara kepada negara lain sehingga menggunakan kekuatan-kekuatan dalam negeri untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya tersebut.

2. *Independence* yang berarti mandiri, kedaulatan suatu negara untuk mengatur rumah tangga negara baik kedalam maupun keluar, militer dan ekonomi tanpa campur tangan dan tunduk kepada negara lain tujuannya untuk mendapatkan kekuatan dengan melakukan kerjasama dengan negara lain agar negara tersebut tidak dijajah atau tunduk kepada negara lainnya.

3. *Military Security*, keamanan suatu negara dinilai dengan kekuatan militer untuk mempertahankan atau menjaga keamanan territorial dari kekuatan militer negara lain maupun kelompok separatis, tujuannya untuk menjaga negaranya dari ancaman militer manapun sebagai bentuk dari antisipasi.

4. *Territory Integrity*, yaitu kepentingan nasional untuk mengamankan daerah teritorinya dan sumber

daya yang berada dalam daerah teritori sebuah negara tujuannya untuk mendapatkan kebutuhan terhadap suatu wilayah yang dinilai strategis dan menguntungkan.

5. *Economic Well Being* tujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan maksud tujuan memperoleh cadangan devisa negara lain, misalnya gas dan minyak bumi untuk kesejahteraan ekonomi dalam negeri.

Dari kelima kategori umum yang dijabarkan oleh Jack C. Plano diatas, penulis beranggapan bahwa ada 4 poin yaitu : *Self Preservation, Independence, Military Security* dan *Economic Well Being* sebagai unsur yang paling sesuai untuk diaplikasikan pada pembahasan mengenai Faktor-faktor apa yang menjadikan Taiwan sebagai salah satu Macan Asia.

Salah satu faktor yang menjadikan Taiwan sebagai salah satu Macan Asia yakni pertama adalah adanya kepentingan *Self preservation* dengan maksud tujuan untuk mempertahankan eksistensinya di kawasan Asia. Kepentingan tersebut merupakan untuk bertahan diri dari hegemoni negara lain demi kelangsungan hidup suatu negara, dimana Taiwan sebagai sebuah negara yang ingin diakui oleh dunia meskipun dalam hal legitimasi Taiwan hanya diakui oleh beberapa negara saja. Disana Taiwan perlu adanya kepentingan nasional untuk memperoleh pengakuan politik dari kancah Internasional guna melangsungkan kehidupan negaranya. Oleh sebab itu dalam berbagai aspek kerjasama dengan negara lain Taiwan selalu mengupayakan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak langsung yakni memperoleh

pengakuan baik secara ekonomi, politik, budaya maupun bidang lainnya.

Kedua, yaitu kepentingan Nasional faktor *Independence*. Melihat kembali pada sejarah bagaimana Taiwan memisahkan diri dari pemerintahan daratan China menunjukkan bahwa Taiwan menginginkan kebebasan serta bersikap mandiri dalam hak otoritas negara nya sendiri. Taiwan telah mengatur dan memiliki struktur pemerintahan sendiri hal ini menjelaskan tekad bulat Taiwan untuk menjadi sebuah negara yang berdiri kukuh dan mandiri serta melindungi hak rakyat nya dan tidak ingin dicampur tangankan segala urusan oleh negara lain dalam hal ini dimaksudkan negara China.

Selanjutnya faktor *Military Security* juga turut menjadi faktor yang mewarnai kepentingan Nasional Taiwan. Diketahui bahwa Taiwan sejak mendirikan kedaulatannya sendiri sudah mulai membangun dan mempersiapkan pasukan militer serta persenjataannya secara individu. Hal tersebut menunjukkan tekad Taiwan dalam menjaga batas teritorialnya dari kekuatan militer negara lain maupun kelompok separatis, tujuannya untuk menjaga negaranya dari kekuatan ancaman militer suatu kelompok dalam bentuk antisipasi.

Faktor terakhir, Taiwan sebagai Macan Asia juga memiliki kepentingan dalam hal *Economic Well Being*. Selain untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya Taiwan membangun ekonomi domestik maupun luar negeri nya secara tertata dan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Taiwan pantas untuk mendapatkan pengakuan bahkan hingga aspek ekonomi. Hal-hal yang dilakukan untuk pencapaian tersebut dapat melalui berbagai macam

cara, yaitu salah satunya dengan memperkuat pembangunan dan perkembangan ekonomi Taiwan. Kesuksesan yang diraih Taiwan yang kemudian diperhitungkan dalam melakukan kebijakan luar negeri secara ekonomi mampu mengangkat derajat negara tersebut pula di bidang politik seperti yang diharapkan. Sebab kerjasama ekonomi luar negeri Taiwan tidak perlu diragukan lagi. Taiwan sudah mampu membuktikan kredibilitasnya dalam hal kemajuan teknologi yang kemudian disalurkan oleh kerjasama ekspor impor dengan negara asing di seluruh belahan dunia, terutama dalam persaingan pasar Asia.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berfikir yang telah dijelaskan, maka penulis mengambil hipotesa bahwa faktor-faktor yang menjadikan Taiwan sebagai macan Asia meskipun hanya sedikit negara yang mengakui kedaulatannya yakni karena adanya tuntutan kepentingan nasional *Self Preservation* (mempertahankan eksistensi diri) yang diwujudkan melalui:

1. Politik domestik yang menganut sistem demokrasi mendapat dukungan penuh dari rakyat sehingga mudah untuk menjalin relasi dengan sesama Negara demokrasi.
2. Kemampuan Ekonomi industri Taiwan yang maju sehingga banyak negara yang melakukan kerjasama ekonomi secara informal
3. Konteks Internasional yang mendukung berupa geopolitik yang strategis untuk memperoleh Aliansi Internasional

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dengan didukung oleh fakta dan bukti. Yang mana rumusan masalahnya adalah Faktor – faktor apa yang menjadikan Taiwan sebagai Macan Asia. Serta untuk mengetahui lebih jelas tujuan dan arah kemajuan ekonomi global Taiwan.

F. Metode

Pembahasan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menelaah suatu prinsip-prinsip umum untuk mengkaji peristiwa-peristiwa khusus. Metode menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur/studi pustaka dan pencarian data yang digunakan adalah dengan pengumpulan data serta informasi terkait dari berbagai media cetak seperti buku, surat kabar dan media elektronik internet serta dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan politik industri Taiwan dalam pasar Asia. Dan metode analisa yang digunakan terkait rumusan masalah adalah metode analitik.

G. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menentukan jangkauan penelitian pada tahun 1997 – 2016. Penulis menggunakan jangkauan tersebut karena pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi besar-besaran dalam pasar Asia, namun krisis finansial Asia tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi Taiwan yang tumbuh sekitar 5% per tahun, dengan nyaris seluruh penduduknya bekerja dan inflasi rendah.

H. Sistematika

Bab I menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan

Bab II memaparkan penjelasan mengenai berdirinya Taiwan hingga proses yang menjadikannya sebagai Macan Asia. Bab ini menguraikan gambaran umum, tahapan-tahapan pembangunan dan kondisi ekonomi politik serta potensi-potensi yang ada di kawasan Taiwan sehingga dapat menjadi salah satu dari Macan Asia

Bab III menjelaskan berbagai kebijakan serta kerjasama ekonomi luar negeri Taiwan. Bab ini memaparkan bentuk-bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan untuk mencapai kerjasama ekonomi luar negeri dengan beberapa negara dan upaya membangun hubungan diplomatik dalam rangka mencari peluang untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain.

Bab IV menjelaskan faktor-faktor yang membangun keberhasilan perekonomian Taiwan sehingga menjadikannya satu dari Macan Asia. Bab ini memaparkan hipotesa yang penulis buat untuk menjelaskan faktor-faktor industri yang menjadikan kuatnya perekonomian Taiwan serta peluang yang bisa didapatkan Taiwan dalam kerjasama ekonomi di pasar Asia sehingga mendapatkan pengakuan dunia.

Bab V membahas sebuah kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang ada skripsi ini.